

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

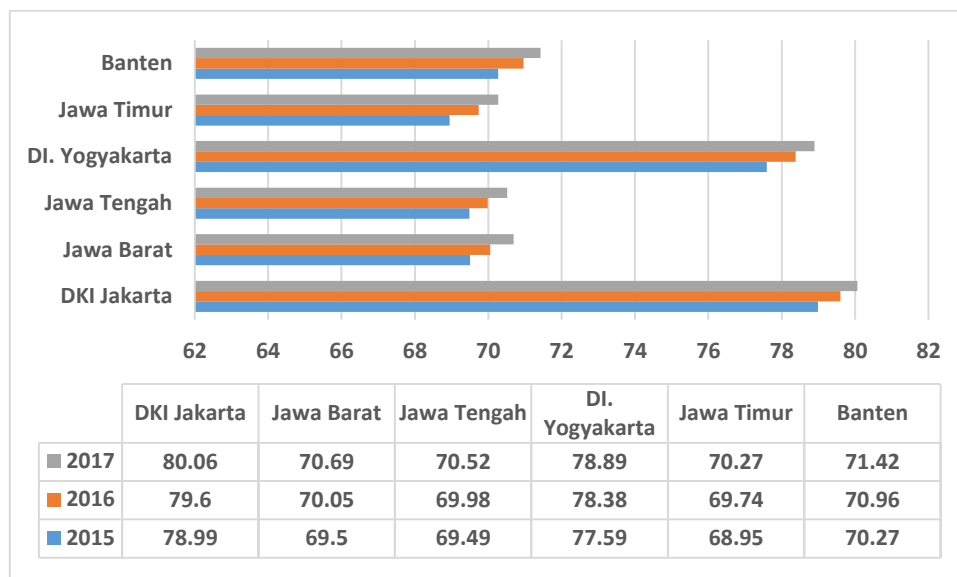
Pembangunan ekonomi suatu Negara merupakan suatu upaya yang dilakukan pemerintah terkait kesejahteraan masyarakat serta terwujudnya kemakmuran masyarakat. Dalam pembangunan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terdapat empat faktor yang mempengaruhi, salah satunya yaitu faktor Sumber Daya Manusia menurut Samuelson (Samuelson 2005). Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penentu keberhasilan pembangunan nasional melalui kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Dalam penentu pembangunan kualitas sumber daya manusia indikator pendidikan dan latihan, kesehatan, gizi serta penurunan fertilitas merupakan indikator yang bermuara pada peningkatan produktivitas manusia. Pendidikan menjadi salah satu indikator utama dalam pembangunan sumberdaya manusia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang meningkat, sehingga kualitas sumberdaya manusia tergantung dari kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat strategis dalam pembangunan nasional. Dimana pendidikan memiliki peran yang penting dalam membentuk kemampuan sebuah Negara berkembang untuk menyerap teknologi modern serta untuk mengembangkan kapasitas agar terciptanya pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan (Tadaro 2004).

Pendidikan menjadi hal yang penting bagi manusia dimana, pendidikan salah satu aspek yang menentukan tingkat kemampuan seseorang dalam menghadapi kehidupan. Adanya perkembangan kebudayaan manusia, maka timbullah tuntutan akan adanya pendidikan yang terselenggara lebih baik, lebih

teratur serta didasarkan atas pemikiran yang matang. Pembangunan pendidikan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam mencapai kemajuan di berbagai bidang kehidupan, seperti : ekonomi, sosial, politik dan budaya. Hal tersebut menjadikan pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga Negara dalam memperoleh layanan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan amanat UUD 1945, dimana pemerintah wajib bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menajukan kesejahteraan umum. Masalah pemerataan pendidikan muncul karena dalam UUD 1945 telah mengemukakan bahwa semua warga Negara berhak mendapatkan pengajaran/pendidikan (Rohman 2009). Dengan adanya hal tersebut pemerintah melakukan berbagai strategi dalam meningkatkan pendidikan agar masyarakat dapat memperoleh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi yang dapat mendorong meningkatnya kualitas sumberdaya manusia. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan sasaran utama dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan merupakan sasaran utama dari RPJPN 2005-2025. Pembangunan pendidikan dan *support* anggaran (subsidi) yang besar menjadi upaya pemerintah dalam mencapai sasaran kualitas sumber daya manusia yaitu dengan mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan.

Pembangunan pendidikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan harapan sekolah sehingga kualitas sumber daya manusia meningkat. Kualitas sumber daya manusia diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dimana pendidikan merupakan indikator dari Indeks Pembangunan Manusia, apabila pendidikan suatu daerah rendah maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga rendah sehingga kualitas hidup masyarakat daerah tersebut juga rendah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur kualitas hidup manusia digunakan

indikator yang di sebut Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri dari tiga indikator sebagai ukuran kualitas hidup manusia. Ketiga indikator pembentuk kualitas hidup manusia tersebut adalah kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Indikator pendidikan berpotensi dalam meningkatkn kualitas hidup. Dimana peningkatan mutu pendidikan dapat menjadi potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa di masa depan. Hal tersebut dilakukan dengan memprioritaskan pada pembangunan manusia pada arah pendidikan yang jelas.



Gambar 1.1 Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa tahun 2015-2017

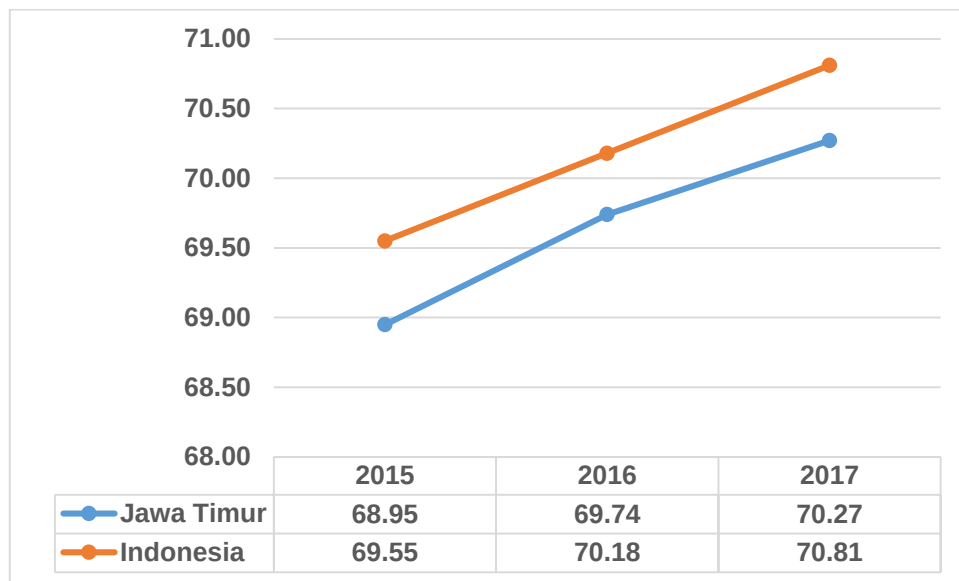
Sumber : BPS, 2019 (diolah).

Data BPS mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa menunjukkan perkembangan yang baik tiap tahunnya. Dimana dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Jawa mengalami pertumbuhan yang meningkat. Namun pertumbuhan tersebut mengalami perbedaan di setiap provinsinya. Provinsi DKI Jakarta memiliki Indeks Pembangunan Manusia yang cukup tinggi diantara provinsi lainnya di Pulau Jawa

yaitu dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 80.06 di tahun 2017. Provinsi kedua yaitu provinsi DI Yogyakarta dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia sebesar 78.89. Namun diantara Provinsi yang ada di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur memiliki Indeks Pembangunan yang cukup rendah. Dimana nilai IPM Jawa Timur tahun 2017 yaitu sebesar 70.27.

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang memiliki kualitas hidup yang belum merata. Pembangunan manusia di setiap Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur masih belum merata dan masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 1.2.

Berdasarkan gambar 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Manusia yang ada di Jawa Timur pada tahun 2017 sebesar 70.27. Namun nilai tersebut masih di bawa rata-rata dari Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang bernilai sebesar 70.81. Hal tersebut menjadikan Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur terdapat kesenjangan dalam pembangunan manusia. Di lihat dari nilai Indeks Pembangunan Manusia Kota Surabaya yang merupakan IPM tertinggi di Provinsi Jawa Timur. Disisi lain masih terdapat nilai Indeks Pembnagunan Manusia (IPM) yang cukup jauh dari rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur, yaitu Kabupaten Sampang. Kabupaten Sampang menjadi Kabupaten yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang paling rendah di Jawa Timur.

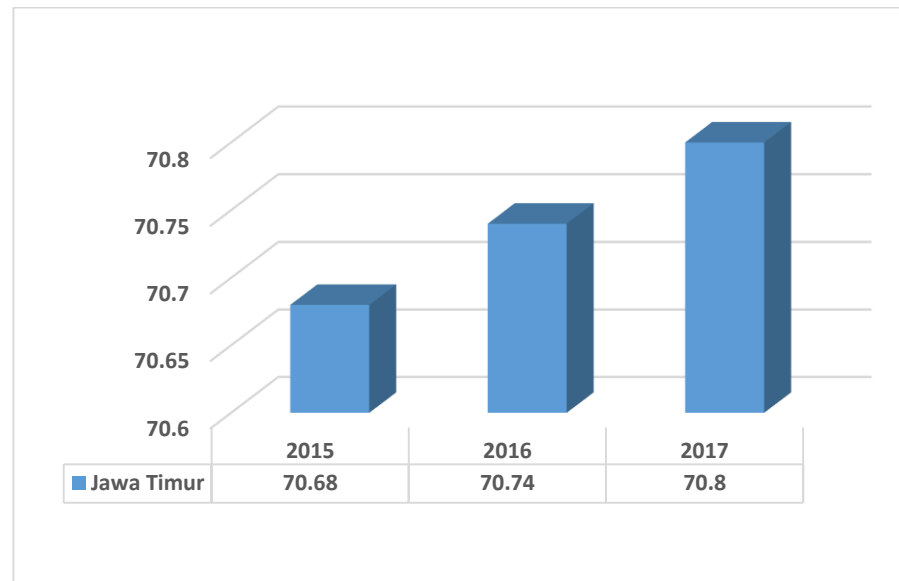


Gambar 1.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Timur Tahun 2015-2017

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur ,2019 (diolah).

IPM yang rendah menjadikan provinsi Jawa Timur memiliki kualitas sumber daya manusia yang rendah pula. Dimana rendahnya IPM menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan dan harapan lama sekolah juga rendah. Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan tentang bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan (Badan Pusat Statistik, 2019). Jika dilihat dari tiga dimensi pembentukan IPM, maka provinsi Jawa Timur memiliki kesehatan , pendidikan serta ekonomi yang rendah.

Indikator kesehatan diwakili oleh Angka Harapan Hidup yang merupakan indikator yang dapat mencerminkan drajat kesehatan suatu wilayah. Dalam kurun waktu 2015-2017 tren Angka Harapan Hidup (AHH) provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan meskipun hanya 0,06% yang berarti bahwa peningkatannya cukup rendah. data tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

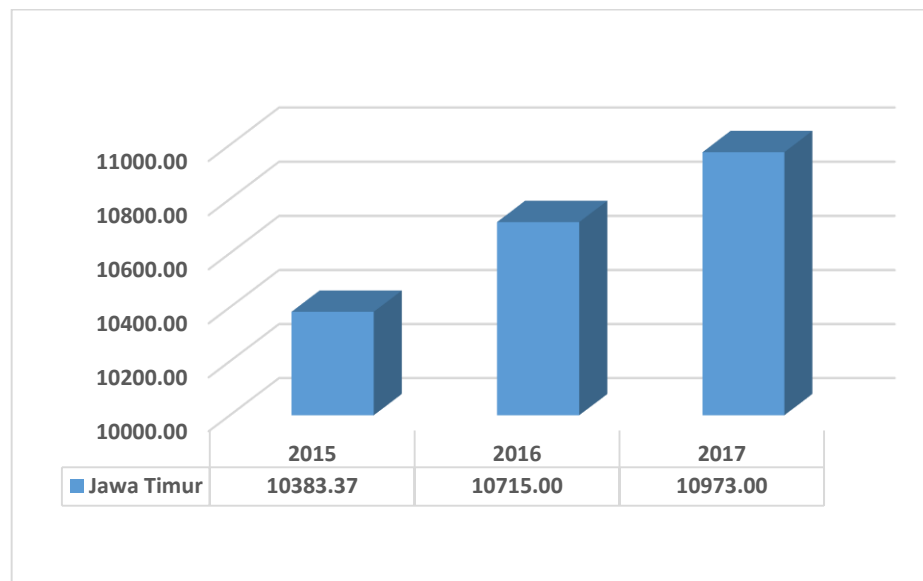


Gambar 1.3 Tabel Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2019 (diolah).

Berdasarkan gambar 1.3 tersebut dapat dilihat bahwa derajat kesehatan masyarakat provinsi Jawa Timur yang dilihat dari AHH menunjukkan pertumbuhan yang relatif rendah. Dimana pertumbuhan AHH dari tahun 2015-2017 hanya sebesar 0,06 %. Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Jawa Timur tertinggi pada tahun 2017 yaitu sebesar 70.8 tahun. Hal tersebut berarti bahwa rata-rata hidup masyarakat Provinsi Jawa Timur hanya sampai umur 70 tahun.

Berdasarkan indikator ekonomi yang diwakili oleh pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan yang menunjukkan standar hidup layak penduduk Provinsi Jawa Timur.

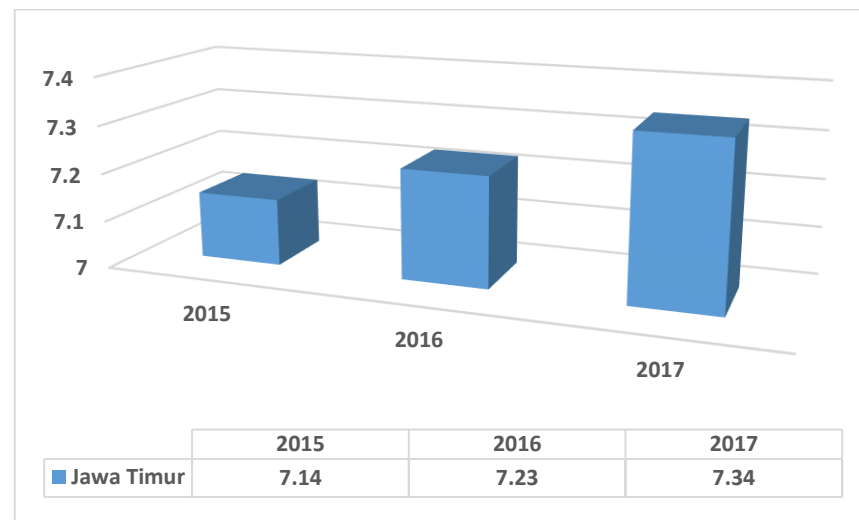


Gambar 1.4 Pengeluaran Per Kapita Rill Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2019 (diolah).

Dari gambar 1.3 dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita rill Provinsi Jawa Timur meningkat tiap tahunnya. Dimana tertinggi pada tahun 2017 sebesar 10973 ribu rupiah. Meskipun terdapat peningkatan tiap tahunnya, namun pengeluaran per kapita rill Provinsi Jawa Timur masih rendah karena masih di bawah rata-rata pengeluaran per kapita rill provinsi lain di Pulau Jawa.

Selain indikator kesehatan dan ekonmi, indikator pendidikan juga termasuk pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pendidikan memberikan kontribusi terhadap pembangunan suatu daerah. Dimana indikator pendidikan diwakili oleh rata-rata lama sekolah yang menunjukkan seberapa besar tingkat seseorang atau penduduk yang bersekolah, karena indikator tersebut menentukan tingkat pendidikan serta kualitas penduduk yang ada di daerah tersebut.



Gambar 1.5 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Timur tahun 2015-2017

Sumber : BPS Jawa Timur , 2019 (diolah).

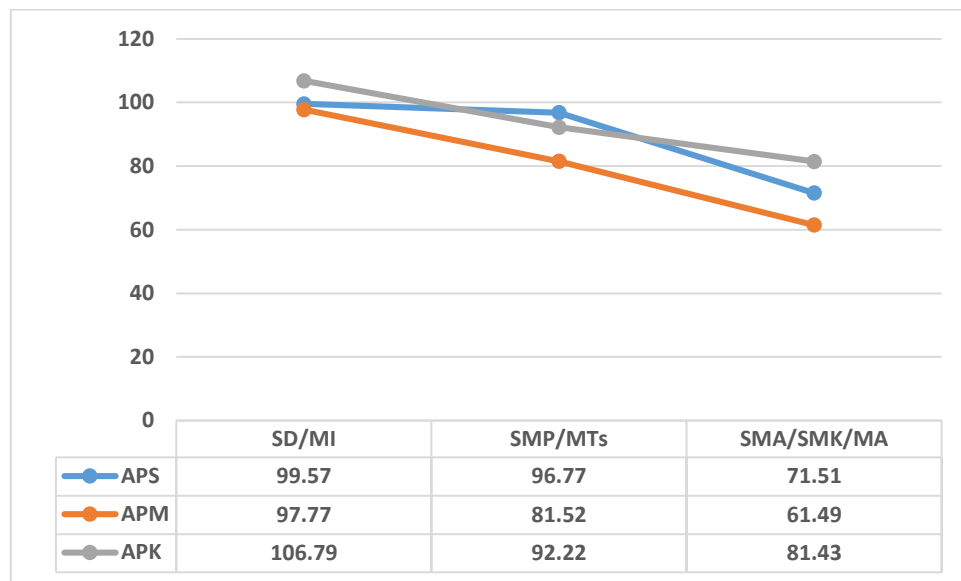
Dari Gambar 1.5 bahwa rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Timur sebesar 7.14 di tahun 2015. Pada tahun 2017 meningkat sebesar 7.35, nilai tersebut masih sangat jauh dengan Nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa penduduk Provinsi Jawa Timur memiliki pendidikan yang rendah yaitu lama sekolah hanya sampai 7 tahun yang berarti bahwa bersekolah hanya sampai tingkat pendidikan sekolah menengah pertama. Apabila rata-rata lama sekolah meningkat maka pendidikan akan membaik sehingga meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan akan memicu pertumbuhan ekonomi.

Dari ketiga indikator tersebut mempunyai keterkaitan antara yang lainnya, jika indikator Angka Harapan Hidup meningkat maka akan mendorong tingkat pendidikan. Pendidikan yang meningkat dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia sehingga produktivitas meningkat yang dapat meningkatkan pendapatan. Apabila pendapatan meningkat maka dapat meningkatkan pengeluaran per kapita riil sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut Brata (2005) dengan

meningkatnya produktivitas dan kreatifitas maka penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Sumberdaya manusia selain sebagai pelaku dari pembangunan juga menjasdi sasaran dari pembangunan itu sendiri. Dibutuhkan sarana serta prasarana dalam mendorong peran sumberdaya manusia dalam pembangunan. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan penduduk dapat mempengaruhi dinamika perubahan serta kualitas kehidupan sosial ekonomi penduduk pada suatu daerah. Pendidikan merupakan sarana dalam mempersiapkan sumber daya manusia dalam pembangunan ekonomi. Pendidikan juga memiliki peran penting dalam mengentaskan kemiskinan, pengangguran serta memberikan ketrampilan kepada masyarakat dalam mengoptimalkan potensinya. Pembangunan pendidikan merupakan kegiatan investasi pada sumber daya manusia. Dimanan keberhasilan pembangunan pendidikan tersebut tercerminkan dari tingginya harapan sekolah. Semakin tinggi harapan sekolah menunjukkan semakin banyak angka partisipasi sekolah pada jenjang sekolah dasar maupun menengah. Tingginya tingkat pendidikan yang di tamatkan penduduk dapat menjadi tolak ukur sebagai tingginya kualitas sumber daya manusia.

Berbagai kemajuan pendidikan yang ada belum tercapai sesuai sasaran. Dimana di Kabupaten Sampang semakin tinggi jenjang pendidikannya, maka angka partisipasi sekolah semakin rendah. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan seberapa besar penduduk usia sekolah yang dapat menikmati pendidikan formal di sekolah. Angka Partisipasi Murni (APM) menggambarkan proporsi anak usia sekolah yang dapat sekolah tepat waktu. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) proporsi anak usia sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu (Badan Pusat Statistik 2018).



Gambar 1.6 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Jawa Timur Tahun 2017
Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2019.

Dari Gambar 1.6 menunjukkan bahwa pada tahun 2017 angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI sebesar 99,57 persen dan SMP/MTS sebesar 97,77 persen. Hal tersebut berarti angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTS tinggi, menunjukkan dampak positif dari program pemerintah wajib belajar 9 tahun. Angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA mengalami penurunan yaitu 71,51 persen yang berarti bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin rendah angka partisipasi sekolahnya. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan SMA/SMK/MA mengalami penurunan yang berarti bahwa anak usia sekolah masih sedikit melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dimana nilai APM pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA sebesar 61.49 persen, sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA yaitu 81.43 persen. Hal tersebut menunjukkan menurunnya anak usia sekolah yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan SMA/SMK/MA setelah tingkat pendidikan SMP/MTS.

Tingkat pendidikan penduduk merupakan faktor yang dominan yang perlu mendapatkan prioritas utama untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Kebijakan pemerintah terhadap peningkatan pendidikan dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan. Kebijakan pendidikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendidikan agar meningkatnya harapan sekolah, mengurangi angka putus sekolah serta memberikan akses yang mudah dan pemerataan pendidikan bagi semua masyarakat khususnya masyarakat miskin. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Proram Indonesia Pintar (PIP). Pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk memperoleh akses pendidikan yaitu melalui program Kartu Indonesia Pintar. Program tersebut diharapkan dapat menjadikan generasi muda memperoleh pendidikan yang layak. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) diluncurkan terkait permasalahan kualitas sumberdaya manusia serta masih banyaknya anak yang putus sekolah karena kesulitan dalam biaya pendidikan.

Dalam Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk menyalurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Kartu Indonesia Pintar ini merupakan kelanjutan dari program Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang mencakup siswa dari jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA dan siswa/warga yang belajar di Pusat Kegiatan Belajar (PKMB)/ lembaga kursus dan pelatihan dari keluarga yang memiliki status ekonomi yang rendah secara nasional.

Adanya Program KIP tersebut bertujuan untuk meningkatkan harapan sekolah masyarakat miskin yang tidak mampu mebayar pendidikan. Dimana dari

program Kartu Indonesia Pintar tersebut sasaran BSM/PIP pemerintah pada tahun 2015 adalah sebanyak 17.920.270 peserta didik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Data Sasaran Program Indonesia Pintar (PIP) melalui Kartu Indonesi Pintar (KIP)

Jenjang Pendidikan	Sasaran BSM/PIP
SD/Paket A	10.470.610
SMP/Paket B	4.249.607
SMA/Paket C	1.353.515
SMK/Kursus dan Pelatihan	1.846.538
Jumlah	17.920.270

Sumber : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015

Rendahnya pendidikan yang ada di Provinsi Jawa Tmur dan adanya bantuan Kartu Indonesia Pintar maka penulis tertarik untuk mebahas mengenai pengaruh bantuan Kartu Indonesia Pintar terhadap Harapan sekolah di Provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana Pengaruh Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terhadap Harapan Sekolah di Provinsi Jawa Timur.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dala penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) terhadap Harapan Sekolah di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak :

1. Bagi aparat pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengambil kebijakan dalam peningkatan pendidikan.
2. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan pengetahuan tentang Pengaruh Kartu Indonesia Pintar (KIP) terhadap harapan seatau dasar bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian lainnya.
3. Bagi publik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang Pengaruh Kartu Indonesia Pintar (KIP) terhadap Harapan Sekolah.